

STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN PENGUNGKAPAN ESG

DOMINICUS SAVIO MARANDRI
DYNA RACHMAWATI

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Jl. Dinoyo 42-44, Surabaya, Indonesia
account.dominicus.s.22@ukwms.ac.id, dyna@ukwms.ac.id

Received: May 8, 2026; Revised: June 2, 2026; Accepted: July 28, 2026

Abstract: *This study aims to analyze the impact of ownership structure on the level of environmental, social, and governance (ESG) disclosure. The ownership structures in this study include managerial, institutional, family, majority, and government ownership. ESG is considered an important indicator in reflecting a company's commitment to sustainability and social responsibility in the modern business era. These ownership structures have varying impacts on ESG disclosure based on agency theory. This study uses a quantitative approach to test the hypothesis. This study has a population of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2021 to 2024. The study sample consists of 364 company-years. The results of multiple linear regression analysis indicate that managerial and institutional ownership do not affect ESG disclosure. Family and majority ownership have a negative effect on ESG disclosure. Government ownership has a positive effect on ESG disclosure. The control variables in this study are profitability, company size, and leverage. Profitability and leverage do not affect ESG disclosure. Company size has a positive effect on ESG disclosure. The findings of this study have the following implications: first, companies with majority and family ownership tend to withhold strategic information, such as ESG, to protect their interests (entrenchment effect). Second, state-owned enterprises face high public pressure, which leads to increased compliance with ESG disclosures. Third, managerial and institutional ownership do not reduce information asymmetry.*

Keywords: Firms' Size, ESG Disclosure, Leverage, Ownership Structure, Profitability

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak struktur kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan *environmental, social, and governance* (ESG). Struktur kepemilikan pada penelitian ini meliputi manajerial, institusional, keluarga, mayoritas, dan pemerintah. ESG dipandang sebagai indikator penting dalam mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial di era bisnis modern. Struktur kepemilikan tersebut mempunyai dampak yang berbeda-beda terhadap pengungkapan ESG berdasarkan teori keagenan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis. Penelitian ini memiliki populasi perusahaan nonkeuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2024. Sampel penelitian ini sebanyak 364 tahun perusahaan. Hasil analisis regresi linier majemuk menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Kepemilikan keluarga dan mayoritas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ESG. Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG. Variabel kontrol penelitian ini adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG. Hasil penelitian ini mempunyai implikasi: pertama, perusahaan dengan kepemilikan mayoritas dan keluarga cenderung menahan informasi strategis seperti ESG

untuk melindungi kepentingan mereka (*entrenchment effect*). Kedua, BUMN mendapatkan tekanan publik tinggi sehingga cenderung patuh dalam mengungkapkan ESG. Ketiga, kepemilikan manajerial dan institusional tidak mengurangi asimetri informasi.

Kata kunci: *Leverage*, Pengungkapan ESG, Profitabilitas, Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan

PENDAHULUAN

ESG adalah aktivitas yang diterapkan oleh perusahaan karena perusahaan memperhatikan permasalahan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Aktivitas-aktivitasnya digunakan untuk menentukan semua informasi yang memiliki hubungan dengan lingkungan, masyarakat, dan tata kelola perusahaan. Pengungkapan ESG mengacu pada kegiatan praktik perusahaan berupa dokumen dalam bentuk laporan keberlanjutan yang digunakan untuk kegiatan investasi ([CFA Institute 2021](#)). Pengungkapan ESG telah menjadi faktor utama dalam proses pengambilan keputusan investasi, sebab para pemangku kepentingan kini menggunakan informasi tersebut untuk menilai komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan manajemen risiko jangka panjang. Perusahaan melakukan kegiatan ini demi menjaga relasi dengan masyarakat dan juga membantu pegawai dan lingkungan demi keberlanjutan perusahaan itu sendiri ([Triwibowo & Ashri 2025](#)). Contoh pengungkapan ESG dapat dilihat pada Unilever. Pengungkapannya berfokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan kesehatan planet, kepercayaan diri dan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif sebagaimana terdapat dalam laporan keberlanjutannya ([Unilever 2025](#)). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki upaya untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap masalah ESG dan mengungkapkannya dalam laporan keberlanjutan perusahaan.

Laporan keberlanjutan perusahaan dapat menurunkan asimetri informasi. Asimetri informasi adalah kondisi ketika manajer (agen) memiliki akses terhadap informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan pemilik

(prinsipal), sehingga menimbulkan kesenjangan informasi antara agen dan prinsipal. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan adanya hubungan antara dua pihak yang dibentuk menjadi prinsipal (pemilik atau pemegang saham) dan agen (manajemen ataupun orang lainnya yang berhak untuk menjalankan bisnis) yang masing-masing mempunyai kepentingannya sendiri ([Subroto & Endaryati 2024](#)). Agen akan cenderung untuk menahan informasi yang dipublikasikan ke publik. Sehingga prinsipal tidak mempunyai informasi secara komprehensif. Hal ini mengindikasikan adanya konflik keagenan. Konflik keagenan dapat diatasi dengan memperkecil asimetri informasi. Oleh karena itu, perusahaan yang mengungkapkan ESG merupakan salah satu bentuk usaha untuk mengurangi asimetri informasi. Maka dari itu, sebaiknya pengungkapan ESG dapat ditingkatkan untuk mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal.

Asimetri informasi dapat dikurangi antara lain dengan struktur kepemilikan ([Jensen & Meckling 1976](#)). Struktur kepemilikan merupakan aspek penting dalam tata kelola perusahaan yang menggambarkan siapa yang memiliki kendali utama dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Struktur ini mencerminkan distribusi kekuasaan di antara pemegang saham dan dapat dilihat dari tingkat konsentrasi kepemilikan, identitas pemegang saham, serta kesenjangan antara kepemilikan saham dan hak suara yang dimiliki ([Kumar & Zattoni 2015](#)). Struktur kepemilikan mempunyai berbagai keragaman, antara lain: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, kepemilikan mayoritas, dan kepemilikan pemerintah ([Jensen & Meckling 1976](#); [Porta et al. 1998](#)).

Kepemilikan manajerial adalah situasi di mana porsi kepemilikan seorang manajer menjadi besar, posisinya di dalam perusahaan menjadi sangat kuat dan aman, sehingga manajer menjadi kurang peka terhadap tekanan dari pemegang saham lainnya. Dalam kondisi ini, manajer mungkin lebih termotivasi untuk memaksimalkan kekayaan pribadi mereka melalui keputusan jangka panjang melalui ESG. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan ESG ([Sari & Purnomo 2023](#)). Penelitian lainnya membuktikan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ESG ([Amosh & Khatib 2022](#); [Anggarsari & Prasajo 2023](#)). Penelitian-penelitian terdahulu masih belum konsisten dalam membuktikan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan ESG.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan perusahaan keuangan, seperti perbankan, dana pensiun, dan investor institusi lainnya. Kepemilikan institusional sering kali diasosiasikan dengan praktik pengawasan yang ketat terhadap manajemen. Dalam konteks teori keagenan ([Sirait 2024](#)), kepemilikan institusional memiliki insentif untuk mengurangi asimetri informasi dan memastikan manajemen bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Sebagai hasilnya, kehadiran investor institusional cenderung mendorong peningkatan transparansi, termasuk dalam hal pengungkapan ESG. Investor institusional menuntut praktik tata kelola perusahaan yang baik dan pelaporan berkelanjutan yang akurat sebagai bagian dari pengambilan keputusan investasi. [Paramita & Dewi \(2024\)](#) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG. Sedangkan [Anggarsari & Prasajo \(2023\)](#) membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Hasil penelitian-penelitian terdahulu masih belum konsisten.

Kepemilikan keluarga adalah bentuk kepemilikan perusahaan yang dimiliki atau

dikendalikan oleh individu-individu yang memiliki hubungan kekeluargaan, di mana kepemilikan tersebut memengaruhi keputusan strategis dan operasional perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung ([Gimeno et al. 2010](#)). Perusahaan dengan kepemilikan keluarga sering kali menghadapi permasalahan agensi yang unik. Keterlibatan langsung pemilik keluarga dalam pengelolaan dapat mengurangi biaya agensi karena pemilik juga bertindak sebagai pengelola. Di sisi lain, teori agensi juga menyoroti potensi terjadinya penguasaan yang dominan oleh keluarga yang dapat mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas ([Amosh & Khatib 2022](#)). Hal ini menunjukkan potensi adanya asimetri informasi karena mereka cenderung menjaga privasi bisnis dan informasi internal perusahaan, sehingga lebih selektif dalam melakukan pengungkapan. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa [Sandri et al. \(2021\)](#) membuktikan kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG. [Sari \(2016\)](#) membuktikan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ESG. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG ([Amosh & Khatib 2022](#)). Hasil penelitian terdahulu masih belum konsisten dalam menentukan pengaruh kepemilikan keluarga terhadap pengungkapan ESG.

Kepemilikan mayoritas merupakan bentuk kepemilikan saham di mana satu pihak memegang persentase saham yang cukup besar untuk mengendalikan keputusan strategis perusahaan, biasanya melalui hak suara dominan atas dewan direksi dan kebijakan korporat utama ([Monks & Minow 2011](#)). Teori keagenan menjelaskan bahwa keberadaan kepemilikan mayoritas dapat mengurangi konflik agensi melalui mekanisme kontrol langsung terhadap manajemen ([Amosh & Khatib 2022](#)). Namun, dengan kekuatan ini, pemilik mayoritas memiliki posisi untuk mendorong kepentingan mereka sendiri untuk mendapatkan hal yang

mereka inginkan. Maka mereka dapat memengaruhi pengungkapan ESG dengan mengabaikannya jika tidak sejalan dengan kepentingan ekonomis mereka. Studi oleh ([Amosh & Khatib 2022](#); [Kristiawan 2024](#); [Teng et al. 2024](#)) membuktikan bahwa kepemilikan mayoritas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ESG, artinya adanya kepemilikan saham yang dipegang oleh pihak mayoritas akan memicu usaha untuk mementingkan keuntungan pribadi mereka. Penelitian oleh [Jubaedah & Setiawan \(2023\)](#) menghasilkan hasil yang berbeda, di mana ada pengaruh positif. Penelitian ini menunjukkan adanya hasil yang belum konsisten pada penelitian yang meneliti pengaruh hal ini.

Kepemilikan pemerintah adalah bentuk kepemilikan perusahaan di mana negara, baik melalui kementerian, lembaga negara, atau badan usaha milik negara, mempunyai hak kepemilikan atau kendali atas suatu entitas usaha ([OECD 2024](#)). Dengan menghubungkan teori keagenan, munculah hubungan yang kompleks. Di satu sisi, pemerintah sebagai pemilik dapat mendorong pengungkapan ESG yang lebih tinggi sebagai bagian dari misi sosial dan akuntabilitas publik ([Amosh & Khatib 2022](#)). Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpotensi mendorong praktik ESG yang lebih baik. Efektivitasnya sangat tergantung pada kualitas institusi dan tekanan politik yang melekat dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Kembali merujuk pada penelitian [Amosh & Khatib \(2022\)](#), kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan ESG. Namun, penelitian ([Nofrian & Sebrina 2024](#); [Sutawan & Sisdyani 2022](#)) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap pengungkapan ESG. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan hasil dari pengaruh kepemilikan manajerial pada pengungkapan ESG.

Penelitian ini juga menduga bahwa keputusan perusahaan untuk melakukan pengungkapan ESG dipengaruhi oleh karakteristik internal perusahaan itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk mengisolasi pengaruh murni dari struktur kepemilikan, beberapa variabel kontrol perlu dimasukkan dalam model penelitian. Variabel-variabel ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*.

Ukuran perusahaan merupakan faktor fundamental yang sering kali berkorelasi dengan tingkat visibilitas dan tekanan dari publik. Perusahaan yang lebih besar (*large firms*) cenderung mendapatkan lebih banyak sorotan dari media, regulator, dan masyarakat, sehingga mendorong mereka untuk lebih transparan, termasuk dalam hal pengungkapan ESG. Di samping itu, perusahaan besar juga memiliki sumber daya finansial dan manajerial yang lebih memadai untuk mengimplementasikan dan melaporkan inisiatif ESG secara komprehensif. Dengan demikian, variabel ini perlu dikendalikan untuk memastikan bahwa pengaruh yang terdeteksi bukan semata-mata disebabkan oleh skala operasi perusahaan, melainkan benar-benar berasal dari struktur kepemilikannya.

Tingkat profitabilitas perusahaan dapat secara langsung memengaruhi kemampuannya untuk berinvestasi dalam aktivitas yang tidak menghasilkan keuntungan jangka pendek, seperti praktik ESG. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki "kelonggaran finansial" (*financial slack*) yang memungkinkan mereka untuk mengalokasikan dana bagi program-program keberlanjutan dan pelaporannya tanpa mengganggu kinerja keuangan inti. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas rendah mungkin lebih memprioritaskan efisiensi biaya. Oleh karena itu, profitabilitas perlu dijadikan variabel kontrol untuk membedakan antara keputusan pengungkapan ESG yang didorong oleh kesadaran tata kelola dengan yang didorong oleh ketersediaan sumber daya finansial.

Tingkat utang atau *leverage* mencerminkan struktur modal perusahaan dan tingkat risiko finansialnya. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi berada di bawah pengawasan ketat dari para kreditur (seperti bank atau pemegang obligasi). Para kreditur ini

memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa perusahaan mampu mengelola risiko jangka panjangnya dengan baik—termasuk risiko lingkungan dan sosial—agar dapat menjamin pembayaran utang di masa depan. Tekanan dari kreditur ini bisa menjadi pendorong bagi perusahaan untuk lebih transparan dalam pengungkapan ESG sebagai sinyal manajemen risiko yang baik. Dengan mengendalikan variabel leverage, penelitian ini dapat memisahkan pengaruh yang berasal dari tekanan pemilik (struktur kepemilikan) dari tekanan yang berasal dari pihak kreditur.

Penelitian ini memberikan kebaruan dengan mengkaji secara bersamaan pengaruh lima jenis struktur kepemilikan, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, kepemilikan mayoritas, dan kepemilikan pemerintah terhadap tingkat pengungkapan ESG pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian sebelumnya hanya mengkaji 2 sampai 3 kepemilikan yang dapat dilihat dalam penelitian milik [Sari \(2016\)](#). Penelitian ini dapat memberi temuan baru tentang 5 kepemilikan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang perbedaan dampak berbagai struktur kepemilikan dalam mendorong transparansi pelaporan keberlanjutan dengan proksi pengungkapan ESG.

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan landasan fundamental dalam literatur tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak: prinsipal (pemilik/pemegang saham) dan agen (manajemen). Dalam hubungan ini, prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen untuk bertindak atas nama kepentingan prinsipal ([Jensen & Meckling 1976](#)). Namun, pemisahan antara kepemilikan dan kontrol ini secara inheren menimbulkan potensi masalah, yang dikenal sebagai masalah keagenan.

Masalah keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Agen, yang menjalankan operasional perusahaan sehari-hari, memiliki informasi yang lebih lengkap dan terkini mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Keunggulan informasi ini membuka peluang bagi agen untuk melakukan tindakan oportunistik yang menguntungkan diri sendiri—seperti memaksimalkan bonus jangka pendek atau menggunakan fasilitas perusahaan secara berlebihan—yang mungkin tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang prinsipal untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan mekanisme pengawasan dan penyelarasan kepentingan yang efektif. Di sinilah struktur kepemilikan memainkan perannya sebagai salah satu mekanisme tata kelola internal yang paling krusial.

Teori keagenan memandang variasi dalam struktur kepemilikan sebagai cara untuk memitigasi konflik. Kepemilikan manajerial, misalnya, dapat menyelaraskan kepentingan dengan menjadikan agen sebagai prinsipal. Sementara itu, kepemilikan institusional atau kepemilikan terkonsentrasi dapat menciptakan adanya monitor yang kuat, yang memiliki insentif dan kekuatan untuk mengawasi manajemen secara ketat dan menuntut akuntabilitas.

Salah satu wujud akuntabilitas dan mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi adalah melalui transparansi pelaporan. Pengungkapan ESG dapat dipandang sebagai evolusi dari pelaporan perusahaan yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih holistik kepada prinsipal mengenai bagaimana agen mengelola risiko dan peluang jangka panjang. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang mendorong pengawasan yang kuat cenderung akan lebih terdorong untuk melakukan pengungkapan ESG yang komprehensif. Hal ini dilakukan sebagai sinyal kepada pasar bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan berkomitmen pada penciptaan

nilai yang berkelanjutan, yang pada akhirnya bertujuan untuk meminimalkan masalah keagenan.

Pengungkapan ESG

Environmental, social, and governance (ESG) pertama kali diperkenalkan secara resmi melalui laporan berjudul *Who Cares Wins* oleh United Nations Global Compact (UNGC 2004) yang menyampaikan pentingnya integrasi faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam operasi dan strategi bisnis perusahaan. ESG berkembang sebagai kerangka kerja yang tidak hanya digunakan oleh investor untuk mengevaluasi kinerja keberlanjutan perusahaan, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Konsep ESG menandai pergeseran paradigma bahwa kesuksesan perusahaan tidak hanya diukur dari pencapaian laba semata, melainkan juga dari bagaimana perusahaan mengelola dampaknya terhadap lingkungan, tanggung jawab sosial, serta praktik tata kelola yang baik.

ESG mencakup tiga pilar utama. Pilar pertama, aspek lingkungan, berfokus pada bagaimana perusahaan mengelola dampaknya terhadap lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Pilar kedua, aspek sosial, menilai hubungan dan tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, komunitas, dan pemasok, dengan memperhatikan isu-isu seperti hak asasi manusia, kondisi kerja, keberagaman, serta kontribusi sosial. Sementara itu, pilar ketiga, aspek tata kelola, berkaitan dengan struktur dan mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan, termasuk transparansi, akuntabilitas, etika bisnis, dan pengawasan internal. Ketiga pilar ini menjadi acuan dalam menilai komitmen dan kinerja keberlanjutan suatu perusahaan.

Pengungkapan ESG (Environmental, Social, and Governance) adalah proses di mana perusahaan secara sistematis menyampaikan informasi terkait kinerja dan risiko yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola kepada para pemangku kepentingan, khususnya investor. Menurut [CFA Institute \(2021\)](#), pengungkapan ESG bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pemahaman investor terhadap faktor-faktor non-keuangan yang dapat memengaruhi keberlanjutan bisnis dan nilai jangka panjang perusahaan. Standar ini mencakup penyampaian data kuantitatif maupun kualitatif yang relevan, material, dan dapat dibandingkan, agar investor dapat menilai risiko serta peluang keberlanjutan yang dihadapi oleh perusahaan dalam konteks perubahan iklim, tanggung jawab sosial, dan praktik tata kelola yang baik.

Standar pelaporan ESG mengalami perkembangan signifikan melalui diterbitkannya IFRS S1 dan IFRS S2 oleh International Sustainability Standards Board (ISSB) pada tahun 2023. IFRS S1 mendorong integrasi informasi keberlanjutan ke dalam laporan keuangan utama, sedangkan IFRS S2 secara khusus mengatur pengungkapan terkait risiko dan peluang akibat perubahan iklim, yang meliputi empat pilar pengungkapan: tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan ESG telah menjadi kebutuhan strategis dan bukan lagi sekadar tanggung jawab sosial perusahaan.

Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan adalah bentuk pengaturan siapa saja yang memiliki saham dalam suatu perusahaan serta bagaimana hak dan kekuasaan atas pengambilan keputusan perusahaan tersebut dibagi di antara para pemegang saham ([Solomon & Solomon 2004](#)). Struktur ini dapat berupa kepemilikan yang tersebar atau terkonsentrasi, dan melibatkan berbagai tipe pemegang saham seperti individu, institusi, keluarga, hingga pemerintah. Pemilikan

ini menentukan tingkat kontrol atas perusahaan dan berpengaruh terhadap praktik tata kelola, transparansi, serta kebijakan strategis, termasuk pengungkapan keberlanjutan atau ESG. Pada penelitian ini Struktur kepemilikan dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial merujuk pada kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak internal perusahaan, khususnya manajemen ([Diah et al., 2024](#)). Kepemilikan ini diyakini dapat menyelaraskan kepentingan antara manajer dan pemilik karena manajer akan terdorong untuk meningkatkan nilai perusahaan demi keuntungan pribadi mereka sebagai pemegang saham. Kepemilikan manajerial dapat menimbulkan potensi dominasi dalam pengambilan keputusan yang tidak selalu menguntungkan pemegang saham minoritas.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengaruh kepemilikan manajerial dalam penelitian ([Diah et al., 2024](#)). Hal ini menunjukkan manajer memiliki insentif untuk menjaga reputasi dan citra perusahaan, karena mereka lebih terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam hal keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Mereka lebih memahami pentingnya faktor-faktor ini dalam kesuksesan jangka panjang perusahaan. Dengan memiliki saham, manajer cenderung memiliki pandangan jangka panjang dan berusaha mengurangi risiko-risiko yang dapat merugikan perusahaan, seperti isu-isu lingkungan dan sosial.

2. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merujuk pada persentase saham yang dimiliki oleh lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, dan institusi keuangan lainnya. Dengan sumber daya yang besar, institusi-institusi ini sering kali menjadi pemegang saham utama di perusahaan, memberikan mereka kemampuan untuk memengaruhi dan mengawasi aktivitas

manajemen, salah satunya dalam mendorong peningkatan pengungkapan informasi ([Sirait 2024](#)).

Kehadiran kepemilikan institusional diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap keputusan manajemen, mengingat porsi kepemilikannya yang besar dan cenderung dominan. Hal ini memberikan institusi kekuatan untuk memengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk dalam mendorong pengungkapan informasi keberlanjutan. Investor umumnya berorientasi jangka panjang, institusi memiliki kepentingan terhadap praktik tata kelola dan keberlanjutan yang baik untuk menjaga stabilitas serta nilai investasi mereka.

3. Kepemilikan keluarga

Kepemilikan keluarga merujuk pada individu atau kelompok anggota keluarga yang menguasai lebih dari 20% saham dan berperan sebagai pengendali utama dalam perusahaan. Persentase 20% dianggap cukup untuk memberikan kontrol yang efektif terhadap perusahaan ([Sandri et al. 2021](#)). Perusahaan keluarga biasanya lebih fokus pada loyalitas pelanggan ([Sciascia et al. 2012](#)). Dengan ciri-ciri tersebut, perusahaan keluarga sering kali lebih memprioritaskan reputasi yang dibangun oleh keluarga melalui perusahaan, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam setiap keputusan yang diambil. Hal tersebut memberi tanda bahwa perusahaan memiliki taruhan tinggi karena seberapa rentan kepercayaan pelanggan terhadap mereka.

[Sciascia \(2012\)](#) juga menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan keluarga yang terlalu dominan dapat menimbulkan efek negatif. Pengaruh keluarga yang terlalu kuat berpotensi menimbulkan konservatisme, keengganan terhadap transparansi, serta kecenderungan untuk menjaga privasi internal perusahaan. Dalam situasi seperti ini, perusahaan keluarga mungkin menjadi kurang terbuka dalam menyampaikan informasi ESG ke publik.

4. Kepemilikan pemerintah

Kepemilikan pemerintah mengacu pada jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh negara. Pemerintah berinvestasi di perusahaan-perusahaan untuk mencapai tujuan mereka dan mendorong pembangunan ([Amosh & Khatib 2022](#)). Kepemilikan negara dapat meningkatkan legitimasi perusahaan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Keberagaman pihak kepemilikan, termasuk pemerintah, dianggap menguntungkan bagi pemangku kepentingan. Pemerintah juga memandang pengungkapan informasi sebagai prioritas bagi pemangku kepentingan. Hal ini mendukung sistem etika perusahaan yang sebagian dimiliki oleh pemerintah.

Perusahaan-perusahaan yang sebagian dimiliki oleh negara lebih berupaya untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai legitimasi. Pemerintah dapat memberikan tekanan pada dewan perusahaan untuk memperkuat tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yang pada akhirnya mendorong pengungkapan ESG. Beberapa penelitian menemukan bahwa kepemilikan negara memiliki pengaruh positif terhadap praktik pengungkapan, termasuk pengungkapan ESG.

5. Kepemilikan mayoritas

Kepemilikan blok saham/mayoritas merujuk pada situasi di mana seorang pemegang saham atau sekelompok pemegang saham memiliki 5% atau lebih dari total saham perusahaan yang diterbitkan ([Amosh & Khatib 2022](#)). Pemegang blok saham ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan perusahaan dan dapat mengarahkan perusahaan untuk mencapai agenda tertentu. Agenda ini bisa selaras dengan aspirasi pemangku kepentingan, di mana pemegang saham mayoritas menggunakan pengaruhnya untuk memastikan perusahaan memenuhi tuntutan pemangku kepentingan. Namun, di sisi lain, pemegang blok saham juga mungkin membatasi pengungkapan informasi untuk

kepentingan mereka sendiri, yang dapat menyebabkan inkonsistensi informasi.

Hubungan antara kepemilikan blok saham/mayoritas dan pengungkapan ESG dapat bersifat kompleks. Di satu sisi, pemegang saham mayoritas dapat mendorong praktik tata kelola perusahaan yang baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengungkapan ESG. Namun, di sisi lain, ada bukti yang menunjukkan bahwa kepemilikan blok saham/mayoritas dapat berdampak negatif pada pengungkapan ESG. Pemegang saham mayoritas mungkin memiliki agenda yang bertentangan dengan kepentingan pemangku kepentingan yang lebih luas dan mungkin enggan untuk mengungkapkan informasi terkait ESG jika hal itu tidak menguntungkan posisi mereka. Dengan demikian, konsentrasi kepemilikan pada blok pemegang saham dapat meningkatkan asimetri informasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan ESG

Kepemilikan manajerial adalah kondisi ketika manajer perusahaan juga memiliki saham dalam perusahaan tersebut. Dalam teori keagenan, kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu mekanisme untuk menyelaraskan kepentingan antara agen (manajer) dan prinsipal (pemegang saham). Ketika manajer juga menjadi pemilik, ia memiliki insentif untuk bertindak demi keuntungan jangka panjang perusahaan karena ia secara langsung terdampak oleh hasil keputusannya sendiri.

Kepemilikan manajerial mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi ESG secara transparan demi menjaga legitimasi dan kepercayaan pasar. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian [Diah et al. \(2024\)](#) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG.

H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan ESG

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham suatu perusahaan oleh lembaga-lembaga keuangan seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, reksa dana, atau institusi investasi lainnya. Pemegang saham institusional umumnya memiliki keahlian, sumber daya, serta akses terhadap informasi yang lebih baik dibandingkan dengan investor individu biasa. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap tindakan manajemen.

Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan institusional dapat berperan sebagai mekanisme kontrol eksternal yang mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Pemilik institusional memiliki kekuatan untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas perusahaan, termasuk dalam hal pelaporan nonkeuangan seperti pengungkapan ESG. Mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik berkelanjutan demi mengurangi risiko jangka panjang dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata investor global. Penelitian oleh [Diah et al. \(2024\)](#) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan ESG.

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG.

Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Pengungkapan ESG

Kepemilikan keluarga adalah bentuk struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, di mana sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh satu atau beberapa anggota keluarga. Dalam konteks teori agensi, kepemilikan seperti ini berpotensi menciptakan konflik keagenan, yakni antara pemegang saham mayoritas (keluarga) dan pemegang saham minoritas. Ketika keluarga mengendalikan perusahaan, mereka cenderung memiliki akses informasi internal yang lebih

besar dibandingkan dengan pihak luar, dan karena itu asimetri informasi meningkat.

Kondisi ini mengurangi kebutuhan untuk melakukan pengungkapan eksternal secara luas, termasuk pengungkapan ESG, karena informasi penting sudah dapat diperoleh langsung oleh pemilik internal. Perusahaan dengan kepemilikan keluarga cenderung tidak termotivasi untuk mengungkapkan informasi tambahan secara publik, karena informasi sudah tersedia secara privat kepada pemegang kendali. Selain itu, struktur seperti ini dapat dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan pribadi, sehingga pengungkapan ESG dianggap sebagai beban biaya atau ancaman reputasi yang tidak menguntungkan.

Hasil empiris dari penelitian [Putri & Taurusianingsih \(2025\)](#) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan ESG. Artinya, semakin tinggi porsi saham yang dimiliki oleh keluarga, semakin rendah tingkat pengungkapan lingkungan, tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak mendorong transparansi ESG secara sukarela, melainkan lebih cenderung membatasi pengungkapan sebagai bentuk kontrol atas informasi perusahaan.

H₃: Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ESG.

Pengaruh Kepemilikan Mayoritas terhadap Pengungkapan ESG

Kepemilikan mayoritas terjadi ketika satu pihak, baik individu, keluarga, institusi, atau kelompok bisnis tertentu, menguasai lebih dari 50% saham perusahaan. Dengan kontrol tersebut, pemegang saham mayoritas memiliki kekuasaan dominan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk terkait dengan kebijakan pengungkapan informasi.

Pemilik mayoritas yang terlalu dominan bisa jadi tidak memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan secara

terbuka karena pengungkapan tersebut bisa menimbulkan beban biaya, tekanan dari stakeholder eksternal, atau membuka risiko reputasi. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan mayoritas yang tinggi cenderung melakukan pengungkapan ESG secara terbatas, atau hanya sebatas kewajiban minimum, tanpa inisiatif tambahan.

Penelitian oleh [Amosh & Khatib \(2022\)](#) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, seperti kepemilikan mayoritas, dapat mengurangi tingkat pengungkapan ESG. Hal ini disebabkan oleh dominasi pemegang saham mayoritas yang dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada pemangku kepentingan lainnya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, hipotesis diarahkan pada hubungan negatif antara kepemilikan mayoritas dan pengungkapan ESG.

H₄: Kepemilikan mayoritas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ESG.

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan ESG

Kepemilikan pemerintah terjadi ketika sebagian atau seluruh saham perusahaan dimiliki oleh negara atau lembaga yang mewakili kepentingan negara. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah, seperti BUMN, umumnya tunduk pada regulasi yang lebih ketat dan memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar karena berperan sebagai perpanjangan tangan negara dalam pelayanan publik dan pembangunan ekonomi.

Penelitian [Amosh dan Khatib \(2021\)](#) menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah cenderung lebih transparan dalam mengungkapkan informasi ESG, kemungkinan karena tekanan dari regulator dan harapan publik yang lebih tinggi terhadap akuntabilitas dan tanggung jawab sosial perusahaan milik negara. Dengan

mempertimbangkan faktor-faktor di atas, hipotesis diarahkan pada hubungan positif antara kepemilikan pemerintah dan pengungkapan ESG.

H₅: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis. Data yang digunakan adalah *cross-section*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan populasi tersebut dilakukan karena perusahaan publik di Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, sehingga memungkinkan penelitian ini memperoleh data yang dibutuhkan untuk mengukur variabel penelitian, termasuk pengungkapan ESG dan struktur kepemilikan. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan antara lain:

1. Perusahaan secara konsisten menerbitkan laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan selama periode tersebut.
2. Memiliki data lengkap terkait variabel ESG, struktur kepemilikan, dan data keuangan (ROA, DER, total aset). Dengan menggunakan teknik ini, diharapkan sampel yang diperoleh dapat merepresentasikan karakteristik populasi secara relevan dan mendukung validitas hasil penelitian.

Variabel dependen penelitian ini adalah pengungkapan ESG. Variabel independen adalah struktur kepemilikan yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, kepemilikan mayoritas, dan kepemilikan pemerintah. Variabel kontrol terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*. [Tabel 1](#) di bawah ini menunjukkan definisi dan operasionalisasi variabel penelitian.

Tabel 1. Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Referensi
Pengungkapan ESG	Proses pelaporan kinerja dan risiko aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) perusahaan kepada para pemangku kepentingan.	$\frac{\text{Jumlah kata perusahaan i pada periode t}}{\text{Jumlah kata terbanyak pada periode t}}$	Baier et al. (2020)
Kepemilikan Manajerial	Proporsi saham perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh jajaran manajemen.	$\frac{\text{Total managerial ownership}}{\text{total share}} \times 100\%$	Kholifah (2022)
Kepemilikan Institusional	Persentase saham perusahaan yang dikuasai oleh lembaga keuangan atau entitas investasi.	$\frac{\text{Total institutional ownership}}{\text{total share}} \times 100\%$	Tambunan & Wahyuliza (2024)
Kepemilikan Keluarga	Struktur perusahaan di mana pendiri atau keturunannya memegang kendali penuh atas saham dan posisi puncak manajemen.	$\frac{\text{Total family ownership}}{\text{total share}} \times 100\%$	Sandri et al. (2021)
Kepemilikan Mayoritas	Kepemilikan saham di atas 50% oleh satu pihak seperti dalam bentuk perorangan, keluarga, institusi, atau pemerintah	$\frac{\text{Total majority ownership}}{\text{total share}} \times 100\%$	Tapobaly & Widyastuti (2025)
Kepemilikan Pemerintah	Kepemilikan pemerintah adalah rasio jumlah saham milik entitas negara atau daerah terhadap total keseluruhan saham perusahaan.	$\frac{\text{Total government ownership}}{\text{total share}} \times 100\%$	Pardede & Syafruddin (2022)
Profitabilitas	Rasio profitabilitas yang mengukur tingkat efisiensi manajemen dalam memanfaatkan aset untuk mencetak laba	$\frac{\text{Laba bersih}}{\text{total aset}} \times 100\%$	Tapobaly & Widyastuti (2025)
Ukuran perusahaan	Besar kecilnya perusahaan berdasarkan total asset	$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Aset})$	Roestanto Anantya et al. (2022)
Leverage	Struktur modal perusahaan, khususnya tingkat penggunaan utang terhadap ekuitas	$\frac{\text{Total hutang}}{\text{Total ekuitas}} \times 100\%$	Nicholas Sirait (2024)

Tabel 2. Kriteria Pemilihan Sampel

Keterangan	Populasi
Populasi: Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI selama periode 2021-2024	544
Dikurangkan:	
1. Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di BEI selama periode 2021-2024.	(141)
2. Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan annual report dan sustainability report selama periode 2021-2024.	(269)
3. Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan mata uang rupiah selama periode 2021-2024.	(43)
Jumlah perusahaan sampel dalam setahun	91
Periode pengamatan	4 Tahun
Total sampel	364

Penelitian ini menerapkan metode analisis regresi linier majemuk guna mengevaluasi pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan ESG. Dalam model tersebut, turut disertakan tiga variabel kontrol, yaitu profitabilitas yang diproksi dengan ROA, ukuran perusahaan (Size), serta tingkat leverage (DER). Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar dan sejauh mana masing-masing variabel independen memberikan pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Adapun bentuk persamaan regresi linier majemuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$P_ESG = \beta_0 + \beta_1 KM + \beta_2 KI + \beta_3 KF + \beta_4 KMY + \beta_5 KP + \beta_6 ROA + \beta_7 SIZE + \beta_8 DER + \varepsilon$$

Keterangan:

P_ESG = Skor pengungkapan ESG

KM = Kepemilikan Manajerial

KI = Kepemilikan Institusional

KF = Kepemilikan Keluarga

KMY = Kepemilikan Mayoritas

KP = Kepemilikan Pemerintah

ROA = *Return on Assets*

SIZE = Ukuran perusahaan

DER = *Debt to Equity Ratio*

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_8$ = Koefisien regresi

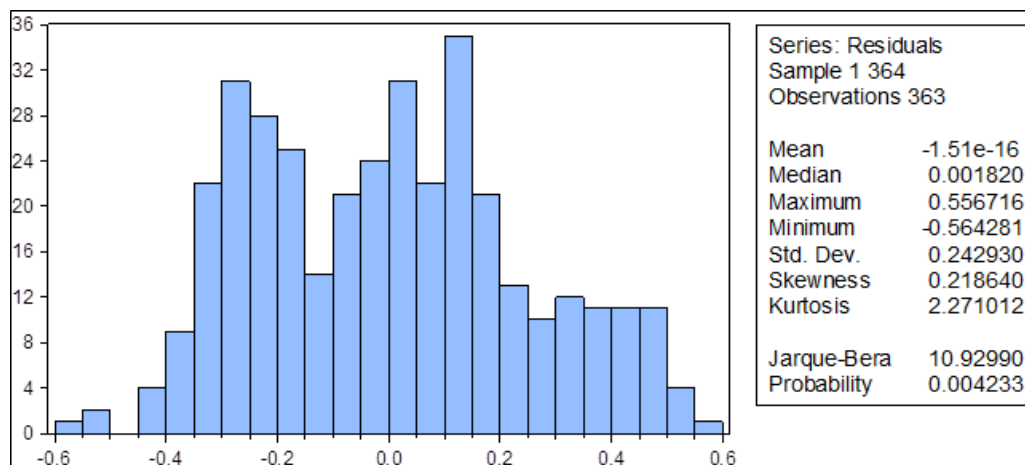
ε = Error

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini dikumpulkan dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan nonkeuangan di berbagai sektor, seperti teknologi, barang baku, perindustrian, serta barang konsumen (primer dan nonprimer) yang terdaftar di BEI pada periode 2021–2024. Penentuan sampel merujuk pada tiga kriteria utama: status pencatatan di BEI, ketersediaan laporan tahunan dan keberlanjutan secara lengkap, serta penggunaan mata uang rupiah dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, diperoleh 91 perusahaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan subjek penelitian dalam rentang waktu empat tahun.

Deskripsi Data

Penelitian ini memanfaatkan beberapa jenis data, di antaranya pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (P_ESG) sebagai variabel dependen, struktur kepemilikan—yang dihubungkan melalui kepemilikan institusional (KI), kepemilikan keluarga (KK), kepemilikan manajerial (KM), kepemilikan mayoritas (KMY), dan kepemilikan pemerintah (KP)—sebagai variabel independen. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *leverage* (DER), profitabilitas (ROA), dan ukuran perusahaan (SIZE) sebagai variabel kontrol.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Tujuan dari analisis statistik deskriptif adalah memberikan gambaran awal data sehingga pembaca dapat memahami karakteristik dari setiap variabel yang digunakan. Analisis ini meliputi nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari setiap variabel. Ringkasan dari pengujian statistik deskriptif disajikan pada Tabel 3.

Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (P_ESG) mempunyai nilai mean sebesar 0,484 dengan standar deviasi 0,258. Ini berarti rata-rata pengungkapan ESG pada perusahaan sampel cukup tinggi. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,022 pada PT. Kedaung Indah Can Tbk periode tahun 2024. Nilai maksimum sebesar 1 yaitu pada PT Bakrie & Brothers Tbk periode 2021 sampai 2024.

Variabel Kepemilikan Manajerial (KM) mempunyai nilai mean sebesar 0,104 dengan standar deviasi sebesar 0,201. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kepemilikan saham oleh pihak manajemen pada perusahaan sampel adalah sebesar 10,4%, yang mengindikasikan tingkat kepemilikan manajerial yang relatif rendah secara keseluruhan. Nilai minimum sebesar 0,000 atau 0% salah satunya terdapat pada PT Astra Graphia Tbk periode tahun 2021-2024, yang menunjukkan bahwa pada periode tersebut manajemen tidak memiliki

saham secara personal di perusahaan. Sementara itu, nilai maksimum sebesar 0,950 atau 95% ditemukan pada Cisarua Mountain Dairy Tbk periode tahun 2021.

Variabel Kepemilikan Institusional (KI) mempunyai nilai *mean* sebesar 0,593 dengan standar deviasi sebesar 0,267. Nilai *mean* yang lebih besar dari standar deviasi ini menunjukkan bahwa sebaran data pada variabel KI cenderung homogen atau tidak memiliki kesenjangan yang terlalu ekstrem antar sampel. Rata-rata kepemilikan institusional sebesar 59,3% mengindikasikan bahwa sebagian besar saham perusahaan sampel dikuasai oleh institusi (seperti perusahaan asuransi, bank, atau dana pensiun). Nilai minimum sebesar 0,000 atau 0% ditemukan pada PT Singaraja Putra Tbk periode tahun 2021, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,986 atau 98,6% dimiliki oleh PT Map Boga Adiperkasa Tbk pada periode tahun 2023.

Variabel Kepemilikan Keluarga (KK) mempunyai nilai mean sebesar 0,175 dengan standar deviasi sebesar 0,303. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata keterlibatan keluarga dalam struktur kepemilikan perusahaan sampel adalah sebesar 17,5%. Dikarenakan nilai standar deviasi (0,303) lebih besar daripada nilai mean (0,175), maka data pada variabel KK memiliki tingkat variasi yang cukup tinggi di antara perusahaan sampel. Nilai minimum sebesar 0,000 atau 0% (tidak memiliki

kepemilikan keluarga) tercatat pada Astra International Tbk pada periode tahun 2021-2024. Sementara itu, nilai maksimum sebesar 0,946 atau 94,6% ditemukan pada PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk pada periode tahun 2021.

Variabel Kepemilikan Mayoritas (KMY) mempunyai nilai mean sebesar 0,530 dengan standar deviasi sebesar 0,203. Nilai mean yang lebih besar dari standar deviasi ($0,530 > 0,203$) menunjukkan bahwa sebaran data pada variabel KMY cenderung homogen atau tidak memiliki kesenjangan yang terlalu ekstrem antar sampel. Rata-rata kepemilikan mayoritas sebesar 53% mengindikasikan bahwa secara umum, perusahaan sampel memiliki pemegang saham pengendali yang menguasai lebih dari separuh total saham perusahaan. Nilai minimum sebesar 0,093 atau 9,3% ditemukan pada PT Industri Dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk periode tahun 2023-2024, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,970 atau 97% dimiliki oleh PT Autopedia Sukses Lestari Tbk pada periode tahun 2021.

Variabel Kepemilikan Pemerintah (KP) mempunyai nilai mean sebesar 0,010 dengan standar deviasi sebesar 0,092. Dikarenakan nilai standar deviasi (0,092) jauh lebih besar daripada nilai mean (0,010), hal ini menunjukkan bahwa terjadi variasi yang sangat tinggi atau ketimpangan data yang besar, di mana hanya sebagian kecil dari total sampel perusahaan yang memiliki porsi kepemilikan pemerintah. Rata-rata kepemilikan pemerintah yang hanya sebesar 1% menunjukkan dominasi sektor swasta yang sangat kuat pada perusahaan sampel. Nilai minimum sebesar 0,000 atau 0% (tidak ada kepemilikan negara) ditemukan pada mayoritas perusahaan sampel, salah satunya pada PT MNC Asia Holding Tbk secara konsisten pada periode tahun 2021-2024. Sementara itu, nilai maksimum sebesar 0,880 atau 88% dimiliki oleh PT Indofarma Tbk pada periode tahun 2021-2024.

Variabel Profitabilitas (ROA) mempunyai nilai mean sebesar 0,028 dengan

standar deviasi sebesar 0,103. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengembalian aset pada perusahaan sampel adalah sebesar 2,8%. Dikarenakan nilai standar deviasi (0,103) lebih besar dari nilai mean (0,028), maka data profitabilitas antar perusahaan sampel memiliki variasi yang cukup tinggi. Nilai minimum sebesar -0,562 ditemukan pada Falmaco Nonwoven Industri Tbk pada periode tahun 2024, yang mengindikasikan perusahaan tersebut mengalami kerugian bersih yang cukup besar. Sementara itu, nilai maksimum sebesar 0,364 atau 36,4% dimiliki oleh PT Mark Dynamics Indonesia Tbk pada periode tahun 2021.

Variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) mempunyai nilai mean sebesar 27,978 dengan standar deviasi sebesar 1,862. Nilai standar deviasi yang jauh lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa data ukuran perusahaan dalam penelitian ini cenderung stabil dan tidak memiliki ketimpangan yang ekstrem antarsampel (homogen). Nilai minimum sebesar 23,566 ditemukan pada Diamond Food Indonesia Tbk periode tahun 2023, sedangkan nilai maksimum sebesar 33,790 dimiliki oleh Astra International Tbk periode tahun 2024. Perbedaan antara nilai minimum dan maksimum yang tidak terlalu jauh menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki skala aset yang relatif setara dalam transformasi logaritma naturalnya.

Variabel Leverage (DER) mempunyai nilai mean sebesar 1,116 dengan standar deviasi sebesar 4,433. Nilai mean sebesar 1,116 menunjukkan bahwa secara rata-rata, perusahaan sampel memiliki utang yang sedikit lebih besar dibandingkan modalnya. Nilai minimum yang ekstrem sebesar -30,153 ditemukan pada PT Asia Pacific Investama Tbk periode tahun 2021. Nilai DER negatif biasanya terjadi pada perusahaan yang mengalami defisiensi modal atau ekuitas negatif akibat kerugian akumulasi. Di sisi lain, nilai maksimum sebesar 41,480 ditemukan pada PT Kokoh Inti Arebama Tbk periode tahun 2022, yang

menunjukkan tingkat ketergantungan utang yang sangat tinggi terhadap modal pada perusahaan tersebut.

Analisis Data

Regresi linier majemuk harus memenuhi asumsi normalitas dan klasik. Hasil uji normalitas dengan Jarque-Bera menunjukkan bahwa error tidak terdistribusi normal. Perlakuan atas ketidaknormalan distribusi error ini menggunakan *Central Limit Theorem* (CLT). CLT menyatakan bahwa distribusi sampel dari populasi akan dianggap terdistribusi normal apabila ukuran sampel cukup besar ([Montgomery & Runger 2018](#)), yaitu jumlah observasi (n) lebih dari 30. Penelitian ini menggunakan 364 sampel, sehingga bisa diasumsikan bahwa error terdistribusi normal.

Hasil uji Glejser menunjukkan ada heteroskedastisitas dengan nilai Sig sebesar 0,0001. Perlakuan atas terjadinya heteroskedastisitas menggunakan metode *White Robust Standard Error* yang tersedia pada Eviews 9. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Hasil uji kelayakan model dengan uji F menunjukkan bahwa model layak untuk digunakan menguji hipotesis. Nilai koefisien determinasi sebesar 11,3%. Artinya semua variabel independen mampu menjelaskan tingkat pengungkapan ESG sebesar 11,3%. Hasil uji normalitas dan asumsi klasik disajikan pada Apendiks.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
KM	0,000	0,950	0,104	0,201
KI	0,000	0,986	0,593	0,266
KK	0,000	0,946	0,175	0,303
KMY	0,093	0,970	0,530	0,203
KP	0,000	0,880	0,010	0,092
ESG	0,022	1,000	0,484	0,258
ROA	-0,562	0,364	0,028	0,103
DER	-30,153	41,480	1,116	4,433
SIZE	23,566	33,790	27,978	1,862

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	Prob	Kesimpulan
Constanta	-0,243	0,261	-
KM	-0,037	0,656	H1 ditolak
KI	0,085	0,230	H2 ditolak
KK	-0,110	0,005	H3 diterima
KMY	-0,183	0,018	H4 diterima
KP	0,374	0,016	H5 diterima
ROA	-0,044	0,731	Tidak signifikan
SIZE	0,028	0,000	Signifikan positif
DER	0,002	0,299	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser				
F-statistic	4.132.758	Prob. F(8,354)		0.0001
Obs*R-squared	3.100.673	Prob. Chi-Square(8)		0.0001
Scaled explained SS	2.561.372	Prob. Chi-Square(8)		0.0012
Test Equation:				
Dependent Variable: ARESID				
Method: Least Squares				
Date: 02/13/26 Time: 10:19				
Sample: 1 364				
Included observations: 363				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.021416	0.121360	0.176465	0.8600
KI	0.048980	0.035677	1.372.862	0.1707
KK	-0.038232	0.022805	-1.676.474	0.0945
KM	-0.031207	0.045648	-0.683652	0.4946
KMR	-0.131200	0.040341	-3.252.264	0.0013
KP	0.069382	0.076958	0.901554	0.3679
DER	0.001406	0.001369	1.026.520	0.3053
ROA	0.136689	0.061201	2.233.430	0.0261
SIZE	0.008040	0.004254	1.889.874	0.0596
R-squared	0.085418	Mean dependent var		0.201835
Adjusted R-squared	0.064749	S.D. dependent var		0.134779
S.E. of regression	0.130343	Akaike info criterion		-1.212.819
Sum squared resid	6.014.181	Schwarz criterion		-1.116.263
Log likelihood	2.291.266	Hannan-Quinn criter.		-1.174.438
F-statistic	4.132.758	Durbin-Watson stat		1.130.267
Prob(F-statistic)	0.000098			

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors				
Date: 02/13/26 Time: 10:20				
Sample: 1 364				
Included observations: 363				
Variable	Coefficient	Uncentered	Centered	
	Variance	VIF	VIF	
C	0.046525	3.092.961		NA
KI	0.004959	1.321.134		2.391.310
KK	0.001473	1.584.450		1.106.842
KM	0.007007	2.912.156		2.203.690
KMR	0.005901	1.346.797		1.346.392
KP	0.024067	1.086.606		1.081.255
DER	4.08E-06	1.082.087		1.068.467
ROA	0.016237	1.244.375		1.225.176
SIZE	5.59E-05	2.846.890		1.241.131

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 7. Hasil Uji Regresi

Dependent Variable: ESG				
Method: Least Squares				
Date: 02/13/26 Time: 10:20				
Sample: 1 364				
Included observations: 363				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.243043	0.215697	-1.126.777	0.2606
KI	0.084663	0.070421	1.202.248	0.2301
KK	-0.109643	0.038382	-2.856.592	0.0045
KM	-0.037299	0.083706	-0.445598	0.6562
KMR	-0.183116	0.076816	-2.383.836	0.0177
KP	0.374286	0.155136	2.412.633	0.0163
DER	0.002101	0.002019	1.040.637	0.2988
ROA	-0.043867	0.127425	-0.344256	0.7309
SIZE	0.028344	0.007478	3.790.197	0.0002
R-squared	0.113284	Mean dependent var		0.483995
Adjusted R-squared	0.093246	S.D. dependent var		0.257982
S.E. of regression	0.245660	Akaike info criterion		0.054745
Sum squared resid	2.136.351	Schwarz criterion		0.151301
Log likelihood	-0.936282	Hannan-Quinn criter.		0.093126
F-statistic	5.653.256	Durbin-Watson stat		0.941775
Prob(F-statistic)	0.000001	Wald F-statistic		6.107.379
Prob(Wald F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil uji hipotesis disajikan Tabel 4. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4, disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$P_{ESG} = -0,2430 - 0,037KM + 0,085KI - 0,110KK - 0,183KMY + 0,3743KP - 0,044ROA + 0,002DER + 0,028SIZE + e$$

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan ESG

Hasil pengujian menunjukkan Kepemilikan manajerial (KM) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Ini berarti kepemilikan manajerial pada perusahaan sampel tidak mempengaruhi tinggi rendahnya pengungkapan ESG. Kepemilikan manajerial pada perusahaan sampel mempunyai nilai mean

sebesar 10% dengan standar deviasi 20%, ini mengindikasikan disparitas KM antar perusahaan sampel cukup tinggi. Rendahnya KM menunjukkan masih adanya masalah keagenan pada perusahaan sampel, sehingga tidak mempengaruhi tinggi rendahnya pengungkapan ESG. Kepemilikan manajerial mengrepresentasikan pihak internal perusahaan, hal ini menunjukkan kecenderungan pihak internal yang cenderung menahan informasi. Sehingga mendorong terjadinya asimetri informasi. Manajemen yang mempunyai saham perusahaan mendapatkan insentif lebih tinggi dibandingkan investor eksternal karena manajemen mempunyai informasi lebih banyak.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris yang tidak mendukung penelitian-penelitian terdahulu. [Kholifah \(2022\)](#) dan [Rivandi \(2020\)](#) menemukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan ESG.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan ESG

Kepemilikan institusional (KI) menunjukkan hasil pengungkapan ESG. Meskipun memiliki rata-rata kepemilikan yang tinggi (59%), hal ini belum mampu menjadi kekuatan pendorong bagi perusahaan dalam meningkatkan transparansi ESG. Temuan ini mengindikasikan bahwa investor institusional pada perusahaan sampel kemungkinan besar masih menitikberatkan fokus pada kinerja keuangan jangka pendek dibandingkan dengan aspek keberlanjutan. Kinerja keuangan dalam konteks ini adalah imbal jasa dalam bentuk dividen atau *capital gain*. Hasil ini memberikan bukti empiris yang tidak mendukung teori keagenan yang menyatakan bahwa institusi dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mendorong transparansi perusahaan.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris yang tidak sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Diah *et al.* (2024). Penelitian tersebut menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan ESG karena institusi dianggap mampu menekan manajemen untuk melakukan praktik bisnis yang berkelanjutan.

Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Pengungkapan ESG

Hasil pengujian menunjukkan kepemilikan keluarga (KK) berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ESG. Ini berarti semakin tinggi kepemilikan keluarga pada perusahaan sampel, semakin rendah tingkat pengungkapan ESG. Tingginya kepemilikan keluarga cenderung membuat pengambilan

keputusan terpusat pada keluarga sebagai pemegang saham utama, sehingga perusahaan lebih berfokus pada kepentingan internal dan cenderung mengurangi transparansi, termasuk dalam pengungkapan ESG.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [Sari \(2016\)](#) bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan ESG. Terbukti, hipotesis ini mengonfirmasi bahwa dominasi keluarga dalam struktur kepemilikan cenderung menciptakan keengganan untuk membuka informasi nonkeuangan kepada publik karena dianggap dapat menimbulkan biaya tambahan dan mengurangi fleksibilitas operasional keluarga.

Pengaruh Kepemilikan Mayoritas terhadap Pengungkapan ESG

Hasil pengujian menunjukkan kepemilikan mayoritas (KMY) berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ESG. Ini berarti semakin tinggi kepemilikan mayoritas pada perusahaan sampel, semakin rendah tingkat pengungkapan ESG. Tingginya konsentrasi kepemilikan ini menyebabkan kontrol perusahaan terpusat pada pemegang saham mayoritas, sehingga berpotensi mendorong pengambilan keputusan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan mengurangi transparansi, termasuk dalam pengungkapan ESG. Kondisi ini sejalan dengan asumsi teori keagenan terkait efek penguasaan (*entrenchment effect*). Pemegang saham mayoritas memiliki hak suara absolut yang memungkinkan mereka untuk mendominasi setiap keputusan strategis tanpa hambatan yang berarti.

Hasil penelitian ini sejalan dan memperkuat temuan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [Amosh & Khatib \(2022\)](#). Penelitian tersebut juga menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan atau kepemilikan mayoritas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ESG.

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan ESG

Hasil pengujian menunjukkan Kepemilikan pemerintah (KP) berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG. Ini berarti semakin tinggi kepemilikan pemerintah pada perusahaan sampel, maka semakin tinggi tingkat pengungkapan ESG. Keberadaan pemerintah sebagai pemegang saham terbukti mampu mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, khususnya dalam pengungkapan ESG, yang menunjukkan bahwa tekanan eksternal seperti regulasi dan tuntutan legitimasi publik lebih berperan dibandingkan mekanisme internal perusahaan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pengungkapan ESG pada perusahaan di Indonesia cenderung didorong oleh faktor eksternal daripada kesadaran internal perusahaan.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [Amosh & Khatib \(2022\)](#) yang menemukan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG. Terbuktinya hipotesis ini menegaskan bahwa intervensi dan kontrol dari negara efektif dalam memaksa perusahaan untuk lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap isu-isu lingkungan, sosial, maupun tata kelola.

Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Pengungkapan ESG

Hasil pengujian menunjukkan ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG. Ini berarti semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi tingkat pengungkapan ESG. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar cenderung mendapatkan tekanan eksternal, sehingga berdampak positif terhadap pengungkapan ESG.

Pengujian juga membuktikan bahwa profitabilitas (*leverage*) yang diproksikan dengan *return on assets* (ROA) dan (*debt-to-equity ratio* (DER)) tidak berpengaruh terhadap

pengungkapan ESG. Ini berarti aktivitas ESG tidak didanai baik dari hasil profitabilitas maupun utang, sehingga tidak mempengaruhi tinggi rendahnya pengungkapan ESG pada perusahaan sampel.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme tata kelola yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak dapat mengurangi konflik keagenan karena hasilnya tidak signifikan secara statistik. Sedangkan kepemilikan keluarga dan kepemilikan mayoritas justru mengurangi tingkat transparansi dalam pelaporan ESG. Ini berarti terjadi *entrenchment effect* pada perusahaan keluarga dan perusahaan yang dimiliki oleh kelompok mayoritas. Berbeda dengan kepemilikan keluarga dan mayoritas, kepemilikan pemerintah berdampak positif terhadap pengungkapan ESG. Ini mengindikasikan bahwa BUMN mendapatkan tekanan publik dalam melakukan aktivitas ESG sehingga meningkatkan transparansi pelaporannya.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan, pertama, pada tingkat generalisasi hanya pada perusahaan nonkeuangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan objek penelitiannya pada perusahaan keuangan. Kedua, pengujian menggunakan *ordinary least square* (OLS) yang mengasumsikan semua sektor mempunyai karakteristik sama. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan regresi data panel untuk mengatasi masalah terkait variasi antar sektor.

Implikasi penelitian ini adalah bahwa, pertama, investor perlu berhati-hati untuk melakukan investasi pada perusahaan keluarga dan perusahaan dengan kepemilikan mayoritas. Perusahaan-perusahaan tersebut cenderung kurang transparan. Kedua, investor sebaiknya melakukan investasi pada perusahaan milik pemerintah karena transparansinya cukup tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amosh, H. al, & Khatib, S. F. A. 2022. Ownership structure and environmental, social and governance performance disclosure: the moderating role of the board independence. *Journal of Business and Socio-Economic Development*, 2(1), 49–66. <https://doi.org/10.1108/jbsed-07-2021-0094>
- Anggarsari, A., & Prasajo. 2023. Relationship between Financial Performance and Ownership Structure on Sustainability Disclosure in SRI-KEHATI Index Firms. *Journal of Accounting Inquiry*, 3(1), 001–009. <https://doi.org/10.14421/jai.2024.3.1.001-009>
- Baier, P., Berninger, M., & Kiesel, F. 2020. Environmental, social and governance reporting in annual reports: A textual analysis. *Financial Markets, Institutions and Instruments*, 29(3), 93–118. <https://doi.org/10.1111/fmii.12132>
- CFA Institute. 2021. *Global ESG Disclosure Standards for Investment Products*. CFA Institute.
- Gimeno, A., Baulenas, G., & Coma-Cros, J. 2010. *Family Business Models: Practical Solutions for the Family Business*. Palgrave Macmillan.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Number 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Jubaedah, S., & Setiawan, D. 2023. The effect of ownership structure on social and environmental disclosure in Indonesia. *Diponegoro International Journal of Business*, 6(1), 24–35. <https://doi.org/10.14710/dijb.6.1.2023.24-35>
- Kholifah, S. 2022. *Pengaruh Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Corporate Social responsibility* (Vol. 12, Number 1). <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>
- Kristiawan, N. B. 2024. *The Relationship Between Ownership Concentration, Firm Size and Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesian Manufacturing Companies*. 3(5). <https://doi.org/10.56472/25835238/IRJEMS-V3I5P130>
- Kumalasari Subroto, V., & Endaryati, E. 2024. *Kumpulan Teori Akuntansi*. 1–6.
- Kumar, P., & Zattoni, A. 2015. Ownership structure, corporate governance and firm performance. In *Corporate Governance: An International Review* (Vol. 23, Number 6, pp. 469–471). Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1111/corg.12146>
- Monks, R. A. G., & Minow, N. 2011. *Corporate Governance* (5TH ed.). John Wiley & Sons, Ltd.
- Montgomery, D. C., & Runger, G. C. 2018. *Applied Statistics and Probability for Engineers*.
- Nicholas Sirait, K. 2024. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(1), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Nofrian, M. R., & Sebrina, N. 2024. Pengaruh ESG terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Pemerintah dan Sensitivitas Industri Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 2(1), 17–33. <https://doi.org/10.24036/jnka.v2i1.21>
- OECD. 2024. *Ownership and Governance of State-Owned Enterprises 2024*. OECD. <https://doi.org/10.1787/395c9956-en>
- Paramita, K. D. Y., & Dewi, L. G. K. D. 2024. *The Impact of Board Gender Diversity and Ownership structure on ESG Disclosure*. Volume 5, Nomor 4 (Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (DIJEFA)). <https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i4>
- Pardede, P. G. W., & Syafruddin, M. 2022. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Financial Distress (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011- 2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

- Porta, R. La, Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. 1998. *Corporate Ownership Around the World*. <https://doi.org/https://doi.org/10.3386/w6625>
- Putri, V. M., & Taurusianingsih, D. N. 2025. Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Yang Dimediasi Oleh Pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) Pada Perusahaan IDX80 Periode 2019-2023. *Jurnal Ecogen*, 8(2), 367. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v8i2.17283>
- Rivandi, M. 2020. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan High Profile di BEI. *Akuntabilitas*, 13(2), 205–220. <https://doi.org/10.15408/akt.v13i2.17336>
- Roestanto Anantya, Vivianita Alfa, & Nurkomalasari Nyanyu. 2022. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Jenis Industri, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure (Studi Empiris Perusahaan di Indonesia Yang Terdaftar Di idx 2017-2020)*. 08 no. 1.
- Sandri, A. Bi., Prihatni, R., & Armeliza, D. 2021. Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Keluarga Dan Tekanan Karyawan Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, Vol 2 no 3, 661–675. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/japa.0203.10>
- Sari, A. P. 2016. Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Ekombis: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 2. <https://doi.org/10.35308/ekombis.v2i1.744>
- Sari, N. D. S., & Purnomo, L. I. 2023. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Environmental Disclosure. *Jurnal Online Insan Akuntan*, Vol 8, No 1.
- Sciascia, S., Mazzola, P., Astrachan, J. H., & Pieper, T. M. 2012. The role of family ownership in international entrepreneurship: Exploring nonlinear effects. *Small Business Economics*, 38(1), 15–31. <https://doi.org/10.1007/s11187-010-9264-9>
- Solomon, J., & Solomon, A. 2004. *Corporate Governance and Accountability*.
- Sutawan, M. D., & Sisdyani, E. A. 2022. *Koneksi Politik, Kepemilikan Pemerintah dan Pengungkapan Sustainability Reporting*. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v>
- Tambunan, R., & Wahyuliza, S. 2024. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan ESG (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2020 – 2022). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 13 No.2.
- Tapobaly, A. E. R., & Widyastuti, T. D. 2025. Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Leverage, Dan Majority Shareholders Terhadap Nilai Perusahaan. *Prosiding Working Papers Series In Management*, 17(1), 45–68. <https://doi.org/10.25170/wpm.v17i1.7098>
- Teng, J., Saidin, S. F., Lau, Y. W., & Li, M. 2024. The Effect of Ownership Structure on ESG Disclosure in China. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 14(3). <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v14-i3/22681>
- Triwibowo, R., & Fikri Ashri, A. 2025, February 19. *Bagaimana Korporasi Menerapkan ESG?* Kompas ID. <https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-korporasi-menerapkan-esg>
- UGNC. 2004. *Who Cares Wins*.
- Unilever. (2025). *sustainability*. <https://www.unilever.com/sustainability/>

APENDIKS:

Tabel 8. Kata Kunci Pengungkapan ESG

No.	Topik	Kategori	Kata Kunci
1.	Environmental	<i>Climate change</i>	<i>Biofuels, Climate change strategy, Emissions management and reporting.</i>
		<i>Ecosystem service</i>	<i>Access to land, Biodiversity management, Water.</i>
		<i>Environmental management</i>	<i>Environmental standards, Pollution control, Product opportunities, Supply chain environmental standards, Waste and recycling.</i>
2.	Social	<i>Public health</i>	<i>Access to medicine, Covid*, Nutrition, Product safety.</i>
		<i>Human rights</i>	<i>Community relations, Privacy and free expression, Security, Weak governance zones.</i>
		<i>Labor standards</i>	<i>Diversity, Health and safety, ILO core conventions, Supply chain labor standards.</i>
		<i>Society</i>	<i>Charity, Education, Employment.</i>
3.	Governance	<i>Corporate Governance</i>	<i>Audit and control, Board structure, Remuneration, Shareholder rights, Whistle-blowing system, Transparency, Talent.</i>
		<i>Business ethics</i>	<i>Bribery and corruption, Political influence, Responsible marketing.</i>
		<i>Sustainability management and reporting</i>	<i>Disclosure and reporting, Governance of sustainability issues, Stakeholder engagement, UNGC compliance.</i>

Sumber: [\(Baier et al., 2020\)](#) *Diganti (Asli: HIV and AIDS)